

SINOPSIS

Pergulatan bangsa Indonesia dalam menemukan format yang sesuai dalam mengelola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah bisa dikatakan telah menemukan babak baru sejak runtuhnya rezim orde baru yang menandai lahirnya orde Reformasi. Harapan yang besar terhadap transformasi yang terjadi ternyata tidak selalu sejalan dengan realitas yang ada, khususnya yang menyangkut antara kewenangan pusat dan daerah dalam mengelola pemerintahan. Kabupaten Gunungkidul sebagai salah satu Kabupaten dalam wilayah administratif Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mau tidak mau harus ambil bagian dalam proses perubahan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif historis dengan tempat penelitian di Kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen yang berupa buku-buku, laporan, artikel, majalah serta laporan media massa yang berkaitan dengan penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Gunungkidul. Penelitian ini difokuskan pada penyelenggaraan, kompetensi serta kinerja penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Gunungkidul dengan menggunakan teknik analisa kualitatif.

Penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Gunungkidul pasca reformasi ternyata menunjukkan hasil yang cenderung statis, walaupun di beberapa bidang terjadi fluktuasi dengan nilai yang beragam. Secara umum APBD kabupaten Gunungkidul masih sangat bergantung pada sektor pertanian, angka penduduk miskin masih tinggi, begitu juga dengan angka buta huruf yang masih menempati urutan kelima diantara Kabupaten lain yang berada dalam wilayah administratif Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam bidang kesehatan, sarana dan prasana serta sumber daya yang kurang memadai menambah daftar panjang masih minimnya pelayanan yang diterima masyarakat.

Dalam menyelenggarakan otonomi daerah kedepannya Pemerintah Kabupaten Gunungkidul harus segera membenahi diri agar dapat memiliki daya saing yang mumpuni baik dalam skala provinsi maupun skala nasional. Kreatifitas dan inovasi dalam membuat kebijakan sangat mutlak dibutuhkan, hal ini dikarenakan Kabupaten Gunungkidul terbilang memiliki potensi alam yang luar biasa. Memaksimalkan lahan yang tersedia, mengelola potensi wisata, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah hal yang paling realistis untuk dilakukan saat ini. Mengingat, bahwa Kabupaten Gunungkidul merupakan Kabupaten terluas di DIY ditambah lagi dengan predikat sebagai Kabupaten yang memiliki objek wisata pantai yang paling banyak, maka sudah seharusnya potensi-potensi tersebut digunakan dan dikelola dengan sebaik-baiknya. Dengan begitu, peningkatan taraf hidup masyarakat, baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya diharapkan dapat segera tercapai.